

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

##### 4.1.1. *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, dapat dikatakan bahwa *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul belum berjalan secara maksimal meskipun beberapa aspek sudah berjalan dengan baik sesuai teori Ansell dan Gash (2008) yang dibuktikan dengan pengambilan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi awal *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul terjadi karena adanya ketidakseimbangan sumber daya di antara *stakeholders* sehingga mengharuskan untuk memberdayakan *stakeholders* yang lebih lemah. Dari segi insentif, diharapkan pengembangan wisata Goa Pindul dapat menjadi *tools* untuk kesejahteraan bersama dan adanya sejarah kerjasama yang baik yang ditandai dengan tidak adanya riwayat hubungan yang buruk karena belum pernah adanya hubungan kerjasama sebelumnya dan tidak pernah terikat dengan perjanjian kerjasama lainnya mendorong untuk melakukan kolaborasi.
2. BUMDes Maju Mandiri sebagai *leading sector* dalam pengembangan wisata Goa Pindul belum sepenuhnya memenuhi komponen kepemimpinan yang

fasilitatif. Sosok *leading sector* telah menunjukkan upaya nya untuk melakukan pemberdayaan terhadap *stakeholders* lain dengan menarik para aktor untuk terlibat dan memperluas jaringan kerjasama, namun belum sepenuhnya dapat menjadi fasilitator yang baik dalam kolaborasi dan belum dapat menjaga proses kolaborasi berjalan dengan efektif melalui proses pengawasan kegiatan kolaborasi.

3. Desain Institusional pada pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan wisata Goa Pindul sudah sejalan dalam pelaksanaannya. Terdapat aturan yang mendasari dalam pengembangan wisata Goa Pindul yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2013, Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 56 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, MoU tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa “Maju Mandiri” dengan Unit Usaha Pramuwisata CV. Pokdarwis Dewa Bejo I Nomor 15-PK/BUMDES.MM/2021 dan SOP Pelayanan Wisata Goa Pindul termasuk SOP Pemanduan. Transparansi dalam aturan kolaborasi sudah dilakukan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* dalam pembuatan dan penetapan aturan secara terbuka melalui rapat umum atau musyawarah.
4. Proses kolaboratif belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Beberapa proses kolaboratif pelaksanaannya sudah sesuai seperti Dialog Tatap Muka dengan adanya pertemuan rutin dan adanya proses membangun komunikasi yang baik dan negosiasi dalam pertemuan, proses Berbagi Pemahaman yang ditandai adanya kesamaan tujuan dan pemahaman bersama terhadap isu dan

permasalahan yang ada serta dapat dilihat dari Hasil Sementara dari kolaborasi yang menunjukkan adanya hasil yang nyata dan terdapat strategi yang disepakati untuk mencapai capaian yang diinginkan kedepan dalam pengembangan wisata Goa Pindul, namun beberapa proses kolaboratif masih menimbulkan permasalahan, seperti pada proses membangun kepercayaan yang belum menunjukkan adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi dan kontribusi yang nyata dari para *stakeholders* yang terlibat serta proses membangun komitmen terhadap proses kolaborasi yang belum didukung dengan adanya ketaatan terhadap kesepakatan dalam kolaborasi.

#### 4.1.2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul

Terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul antara lain yaitu:

##### 1. Faktor Pendukung

Faktor kultural menjadi faktor yang mendukung kolaborasi dalam pengembangan wisata Goa Pindul. Adanya kemampuan para *stakeholders* yang cukup baik dalam mengambil terobosan, tingginya partisipasi masyarakat, adanya pemahaman masyarakat bahwa bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan dan bertanggungjawab dalam melakukan pengembangan wisata Goa Pindul, adanya kebiasaan saling

bergotong royong akan menumbuhkan kesadaran untuk terlibat membantu program pengembangan wisata Goa Pindul tanpa adanya paksaan dari luar. Hal ini menyebabkan seluruh *stakeholders* lebih merasa memiliki proses kolaborasi karena dalam pengembangan wisata Goa Pindul tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah saja.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Faktor Struktur Sosial

Faktor struktur sosial belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Adanya struktur hierarki yang horizontal dan tidak adanya hubungan dominasi dalam pengembangan wisata Goa Pindul yang menjadikan hubungan kolaborasi dalam pengembangan wisata Goa Pindul menjadi lebih fleksibel, tidak bersifat kaku, proses pembuatan keputusan menjadi lebih cepat dan pemberdayaan sumber daya menjadi lebih optimal belum didukung dengan adanya para *stakeholders* yang menerima hubungan kolaborasi, yang dibuktikan dengan adanya salah satu pihak yang tidak dapat menerima kehadiran pihak lain dan hubungan kolaborasi yang dilakukan.

### b. Faktor Kepentingan Pemerintah

Kedua unsur faktor kepentingan pemerintah belum terpenuhi dengan baik yaitu adanya kebijakan yang mendukung dalam pengembangan wisata Goa Pindul karena belum adanya kebijakan pemberian sanksi yang tegas dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan adanya kepentingan lain di antara *stakeholders* yang muncul dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang menimbulkan adanya hambatan dalam pengembangan wisata Goa Pindul yaitu program Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan Patuk-Yogyakarta yang menyebabkan adanya realokasi anggaran perbaikan jalan wisata Goa Pindul sepenuhnya digunakan untuk perbaikan jalan Patuk-Yogyakarta.

#### **4.2. Saran**

Untuk memaksimalkan *Collaborative Governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul yang belum berjalan dengan maksimal sebagaimana pemaparan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

4.2.1. Saran yang diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul yaitu:

1. Perlu adanya penguatan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul terhadap *monitoring*, evaluasi, dan koordinasi yang lebih aktif di lapangan dan menyeluruh secara berkala terhadap kinerja, laporan keuangan, transparansi dan publikasi dari BUMDes Maju Mandiri dan Pokdarwis Dewa Bejo.
2. BUMDes Maju Mandiri perlu memperkuat perannya sebagai *leading sector* dan segera melakukan publikasi khususnya terkait laporan keuangan yang dapat dilakukan melalui *website* yang dimiliki agar dapat memudahkan seluruh *stakeholders* untuk memperoleh informasi

berkaitan dengan penjualan tiket dan pengembangan wisata Goa Pindul sehingga tidak ada praduga dari beberapa pihak.

4.2.2. Saran yang diberikan untuk mengatasi faktor yang menghambat *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul yaitu:

1. Diperlukan pendekatan dari BUMDes Maju Mandiri kepada Pokdarwis Dewa Bejo dengan lebih memperhatikan aspirasi dari Pokdarwis Dewa Bejo dan menjalin komunikasi yang lebih baik dan intens.
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul perlu mengambil kebijakan tegas dengan memberikan sanksi sebagaimana tercantum dalam aturan yang ada untuk meningkatkan komitmen *stakeholders* terhadap aturan kolaborasi dan memberikan efek jera bagi pelanggar aturan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu mempertimbangkan kembali terkait alokasi anggaran perbaikan jalan menuju wisata Goa Pindul.